

ANALISIS KEBERHASILAN PEMEKARAN DAERAH

Rini Archda Saputri

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Analysis of Proliferation Success. This study aims to analyze the success of the region of the division, namely Siak. Aspects studied is economic growth and quality of public services. Pelalawan used as a comparison because the area is equally as autonomous regions. This study uses a quantitative method with indexation method for calculating the index of regional economic performance and the index of public service area expansion. The results of this study indicate that the success of regional expansion achieved by Siak in terms of aspects such as: economic growth, GDP per capita, the ratio of the GDP per capita GRDP higher than the parent region, and the low rate of poverty. Based on the comparison made by Pelalawan, looks comparison is quite clear that a regional GDP per capita is high enough, it did not bring considerable influence to the success of the division if poverty rates are also high. From the aspect of public services, the factors that influence the success of regional expansion, among others; Indicators of education, the availability of health facilities, availability of health workers, as well as the quality of infrastructure.

Abstrak: Dinamika Kekuasaan dalam Kebijakan Protokoler di Lingkungan Pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis keberhasilan daerah hasil pemekaran, yaitu Kabupaten Siak. Aspek yang dikaji ialah pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan publik. Kabupaten Pelalawan dijadikan sebagai daerah pembanding karena sama-sama sebagai daerah pemekaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode indeksasi untuk menghitung indeks kinerja ekonomi daerah dan indeks pelayanan publik daerah pemekaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemekaran daerah yang berhasil dicapai oleh Kabupaten Siak ditinjau dari aspek antara lain: pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, rasio PDRB Perkapita terhadap PDRB Propinsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten induk, dan rendahnya angka kemiskinan. Berdasarkan komparasi yang dilakukan dengan Kabupaten Pelalawan, terlihat perbandingan yang cukup jelas bahwa PDRB perkapita suatu daerah yang cukup tinggi, ternyata tidak membawa pengaruh yang cukup besar bagi keberhasilan pemekaran jika angka kemiskinannya juga tinggi. Dari aspek pelayanan publik, faktor yang memengaruhi keberhasilan pemekaran daerah antara lain; Indikator pendidikan, ketersediaan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, serta kualitas infrastruktur.

Kata Kunci: pemekaran daerah, daerah otonom baru, daerah induk

PENDAHULUAN

Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Di dalam PP tersebut disebutkan bahwa tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: (1) peningkatan pelayanan kepada masyarakat, (2) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, (3) percepatan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, (4) peningkatan keamanan dan ketertiban, serta (5) peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Hal yang juga melatarbelakangi semaraknya

fenomena pemekaran daerah adalah karena pembentukan daerah otonomi baru memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya masing-masing. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan memelihara sumber daya nasional yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu daerah berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakasa sendiri dan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka beberapa daerah, bahkan banyak daerah mulai tertarik untuk mengajukan pembentukan daerah otonom baru bagi wilayahnya. Namun

yang perlu diperhatikan adalah apakah fenomena maraknya pemekaran daerah di Indonesia ini hanya merupakan *euphoria* belaka pasca lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, ataukah hal tersebut adalah memang hal yang patut untuk dilakukan dan disertai dengan keberhasilan-keberhasilan DOB dalam mencapai tujuan pemekarannya. Permasalahan timbul ketika pemekaran daerah lebih dilihat sebagai fenomena politik tanpa melihat persyaratan teknis proseduralnya. Akibatnya banyak daerah yang tidak berkinerja secara optimal. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja pemekaran sangat diperlukan.

Beberapa pihak merasakan bahwa pemekaran bukanlah jawaban utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ida, 2005). Fitriani et al. (2005) menegaskan bahwa pemekaran membuka peluang untuk terjadinya *bureaucratic and political rent-seeking*, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pemekaran wilayah, baik dana dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri. Di sisi lain, sebagai sebuah daerah otonom baru, pemerintah daerah dituntut untuk menunjukkan kemampuannya menggali potensi daerah. Hal ini bermuara kepada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada gilirannya menghasilkan suatu perekonomian daerah berbiaya tinggi. Pemekaran juga dianggap sebagai bisnis kelompok elit di daerah yang menginginkan jabatan dan posisi. Eforia demokrasi juga mendukung. Partai politik, yang memang sedang tumbuh, menjadi kendaraan kelompok elit ini menyuarakan aspirasinya, termasuk untuk mendorong pemekaran daerah.

Evaluasi yang dimaksud sangat terkait dengan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Apabila setelah lima tahun setelah pemberian kesempatan memperbaiki kinerja dan mengembangkan potensinya dan hasilnya tidak tercapai maka daerah yang bersangkutan dihapus dan digabungkan dengan daerah lain (BAPPENAS-UNDP, 2008). Harapannya melalui evaluasi maka terdapat gambaran secara umum kondisi DOB hasil pemekaran sehingga dapat dijadikan bahan kebijakan yang cukup kuat dalam penentuan arah kebijakan pemekaran daerah ke depan, termasuk penggabungan daerah.

Pada kenyataannya banyak daerah otonom baru yang gagal dalam mencapai tujuan pemekarannya. Hasil evaluasi kinerja DOB yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerja sama dengan United Nations Development Programme 2001-2007 (2008) menyimpulkan bahwa kondisi daerah otonom baru (DOB) secara umum masih tetap berada di bawah kondisi daerah induk dan daerah kontrol. Sementara itu, hal serupa juga ditunjukkan oleh hasil studi evaluasi (*impact*) penataan DOB yang dilakukan oleh Direktorat Ekonomi Daerah (2008) yang mengindikasikan bahwa kebijakan pemekaran belum berhasil mensejahterakan masyarakat di daerah pemekaran. Pernyataan ini semakin diperkuat dengan hasil penelitian terbaru mengenai kinerja DOB (Kabupaten/Kota) di Indonesia yang dilakukan oleh Fatmawati (2011) yang menunjukkan bahwa 60% DOB belum berhasil dalam pemekarannya.

Di Provinsi Riau ada 5 daerah otonom baru yang terbentuk pasca dilahirkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah. Kelima daerah otonom baru tersebut terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 tentang Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Daerah-daerah otonom baru tersebut adalah Kabupaten Pelalawan (pemekaran dari Kabupaten Kampar), Kabupaten Rokan Hulu (pemekaran dari Kabupaten Kampar), Kabupaten Rokan Hilir (Pemekaran dari Kabupaten Bengkalis), Kabupaten Siak (Pemekaran dari Kabupaten Bengkalis) dan Kabupaten Kuantan Singingi (Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu).

Dari semua daerah otonom baru tersebut, Kabupaten Siak adalah satu-satunya daerah otonom baru yang berhasil dalam pemekarannya terutama dalam faktor kesejahteraan masyarakat. Sementara empat DOB lainnya, yaitu; Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rohil, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Kuantan Singingi dinilai belum berhasil. Selisih positif antara IKE daerah Induk dan IKE DOB menunjukkan bahwa DOB telah berhasil dalam pemekaran. Sedangkan selisih negatif menunjukkan bahwa DOB belum

berhasil dalam pemekaran. Dari data terlihat bahwa Kabupaten Siak adalah satu-satunya daerah otonom baru yang selisih nilai IKE nya positif. Oleh karena itu, Kabupaten Siak dinyatakan sebagai daerah otonom baru yang berhasil dalam pemekarannya. Berbeda dengan 4 DOB lainnya yang menunjukkan selisih negatif. IKE DOB justru lebih rendah daripada IKE daerah induk. Oleh karena itu, keempat DOB tersebut dinyatakan belum berhasil dalam pemekarannya.

Sementara itu, hasil evaluasi yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri tentang kinerja daerah-daerah otonom baru di Indonesia juga menunjukkan hal yang sama. Dibandingkan dengan DOB-DOB lainnya di Provinsi Riau yang sama-sama mekar pada waktu yang sama berdasarkan Undang-Undang No.53 Tahun 1999, Kabupaten Siak merupakan satu-satunya DOB yang berhasil dalam pemekarannya. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang kinerja Kabupaten Siak tersebut sejak mekar hingga saat ini setelah sekitar 15 tahun pemekarannya.

Sebagai kabupaten pembanding, penulis memilih Kabupaten Pelalawan. Pemilihan terhadap Kabupaten Pelalawan dikarenakan dilihat dari PDRB per Kapita, PDRB per Kapita Kabupaten Pelalawan justru lebih tinggi dibandingkan PDRB Kabupaten Siak. PDRB per Kapita suatu daerah merupakan indikator yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan (BAPPENAS, 2007). Dari data terlihat bahwa PDRB per Kapita Kabupaten Pelalawan lebih tinggi dari PDRB per Kapita Kabupaten Siak. Itu artinya, tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pelalawan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Siak. Namun ternyata hal itu saja tidak cukup untuk membawa Kabupaten Pelalawan menjadi daerah otonom baru yang berhasil dalam pemekarannya. Hal ini semakin menarik peneliti untuk meneliti lebih jauh mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan suatu daerah otonom baru dalam pemekarannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini peneliti melakukan penelitian lebih lanjut terkait keberhasilan Kabupaten Siak dalam pemeka-

rannya. Serta untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan pemekaran daerah yang dilakukan Kabupaten Siak yang tidak dimiliki oleh Kabupaten Pelalawan yang belum berhasil.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode indeksasi, yaitu dengan menggunakan perhitungan indeks untuk menghitung indeks kinerja ekonomi dan indeks pelayanan publik sebagai indikator keberhasilan kinerja Daerah Otonom Baru. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif, statistika deskriptif, dan metode indeksasi. Teknik analisis deskriptif untuk memberikan gambaran awal mengenai Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan. Statistika deskriptif untuk memudahkan pembacaan data-data dalam bentuk numerik. Metode indeksasi digunakan untuk menghitung indeks kinerja pelayanan publik dan indeks kinerja ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan gerak berbagai sektor pembangunan dan juga sumber penciptaan lapangan kerja. Adanya peningkatan nilai tambah pada perekonomian mengisyaratkan peningkatan aktifitas ekonomi, baik yang sifatnya internal di daerah yang bersangkutan maupun dalam kaitannya dengan interaksi antar daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah ini digambarkan dengan pertumbuhan PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun 2000. Digunakan PDRB non migas atas dasar harga konstan 2000 dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh harga atau penurunan nilai rupiah (inflasi) dan potensi sumber daya alam khususnya minyak dan gas yang hanya dimiliki beberapa daerah otonomi tertentu saja.

Adanya dana bagi hasil dari pusat karena kepemilikan sumber daya alam tertentu berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, mengakibatkan daerah yang memiliki sumber daya alam tersebut akan mendapatkan transfer anggaran dari pemerintah pusat berupa DBH (Dana

Bagi Hasil) sedangkan daerah yang tidak mempunyai potensi sumber daya tersebut tidak mendapatkan transfer dana bagi hasil. Penerimaan daerah ini berpengaruh besar terhadap struktur dan pertumbuhan PDRB dan tidak adil bila dijadikan bahan perbandingan dengan daerah pemekaran lain yang tidak memiliki potensi sumber daya alam tersebut. Secara umum rasio PDRB Kabupaten Siak terhadap PDRB Provinsi Riau lebih tinggi dari pada rasio PDRB Kabupaten Pelalawan terhadap PDRB provinsi Riau. Besarnya rasio PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi menunjukkan aktifitas perekonomian daerah, maka dalam hal ini terlihat bahwa aktifitas perekonomian Kabupaten Siak lebih tinggi dari pada kabupaten Pelalawan.

Dengan meningkatnya perekonomian Kabupaten Siak, secara nominal terjadi peningkatan dalam pendistribusian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun Pendapatan Regional Perkapita. PDRB Perkapita didapat dari hasil perhitungan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besaran ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan tahun dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu wilayah, maka semakin baik tingkat perekonomian wilayahnya, walaupun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk.

Presentase kemiskinan Kabupaten Siak secara umum lebih rendah dari pada presentase kemiskinan Kabupaten Bengkalis. Angka kemiskinan pada suatu daerah memiliki pengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Semakin rendah angka kemiskinan suatu daerah, maka semakin sejahtera masyarakat di daerah tersebut. Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Siak lebih tinggi dari pada daerah induknya, yaitu Kabupaten Bengkalis. Hal tersebut diindikasikan oleh masih cukup rendahnya presentase angka kemiskinan di Kabupaten Siak daripada Kabupaten Bengkalis. Rendahnya angka kemiskinan dan semakin menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Siak dari tahun ke tahun tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah

Kabupaten Siak. Pemerintah Kabupaten Siak menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu dari 3 isu strategis pembangunan yang menjadi prioritas. Adapun 3 isu strategis yang menjadi prioritas tersebut adalah: pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM dan pembangunan sarana prasarana.

Pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kebodohan menjadi prioritas utama arah kebijakan umum pemerintah daerah Kabupaten Siak pada aspek sumber daya manusia. Hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak tahun 2006-2011. Hal tersebut dijabarkan dengan langkah-langkah yaitu; meningkatkan kualitas IPTEKS sumber daya manusia pelaku pembangunan melalui pendidikan, pelatihan tepat guna dan perbaikan kesehatan agar berdaya saing dan partisipatif dalam pembangunan, dengan sasaran peningkatan indeks pembangunan manusia Kabupaten Siak dan penurunan jumlah keluarga prasejahtera.

Pertumbuhan indeks kinerja ekonomi Kabupaten Siak secara umum relatif stabil dari tahun ke tahun sejak awal pemekarannya hingga tahun 2013, hanya saja terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2009. Sedangkan daerah induknya, Kabupaten Bengkalis juga mengalami pertumbuhan indeks kinerja ekonomi yang cukup fluktuatif, bahkan terjadi penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2006. Namun secara umum, kinerja ekonomi Kabupaten Siak mampu menyaingi kinerja daerah induknya, yaitu Kabupaten Bengkalis. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata IKE kabupaten Siak yang berbeda tipis sekali dengan daerah induknya. Hal ini mengindikasikan bahwa DOB sudah mampu menyaingi daerah induknya.

Kinerja Pelayanan Publik

Aspek utama kedua yang menjadi fokus analisa ini adalah kinerja pelayanan publik dari pemerintah daerah. Pengukuran kinerja ini menitikberatkan pada input apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik. Dari sektor pendidikan jumlah siswa per sekolah di Kabupaten Siak dari tahun

ke tahun sejak tahun 2004 hingga tahun 2013 selalu lebih tinggi dari Kabupaten Bengkalis. Sedangkan Kabupaten Pelalawan menunjukkan hal yang bertolak belakang, dimana sebagai DOB, jumlah siswa per sekolah tingkat SD dan SMP Kabupaten Pelalawan cenderung sedikit lebih rendah dari Kabupaten Induknya, yaitu Kabupaten Kampar.

Jumlah siswa per guru Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis cukup fluktuatif meskipun tidak signifikan. Rasio jumlah siswa per guru di Kabupaten Siak cukup bersaing dan fluktuatif terhadap Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Siak sudah mampu menyaingi kabupaten induknya karena tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis dalam hal rasio siswa per guru. Untuk Kabupaten Pelalawan, rasio jumlah siswa per guru masih jauh lebih tinggi dari pada kabupaten induknya, yaitu Kabupaten Kampar. Hal ini menunjukkan ketersediaan jumlah guru di Kabupaten Pelalawan yang masih kurang dibandingkan kabupaten induknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Kabupaten Pelalawan masih berada di bawah Kabupaten Induknya dalam hal rasio siswa per guru sejak tahun 2004 hingga tahun 2013. Jumlah siswa per sekolah tingkat SMA sederajat di Kabupaten Siak masih cenderung lebih kecil dari daerah induknya, Kabupaten Bengkalis.

Dari sektor kesehatan ketersediaan fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu di Kabupaten Siak signifikan jauh lebih baik dari tahun ke tahun sejak pemekarannya daripada daerah induknya, yaitu Kabupaten Bengkalis. Sedangkan daerah pembandingnya, yaitu Kabupaten Pelalawan secara umum juga memiliki ketersediaan fasilitas kesehatan yang lebih baik daripada daerah induknya meskipun tidak terlalu signifikan. Jika dibandingkan antara 2 DOB tersebut, yaitu Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, maka terlihat jelas perbedaan yang signifikan pertumbuhan ketersediaan fasilitas kesehatan di 2 DOB tersebut. Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Siak tumbuh dengan sangat pesat pasca pemekarannya.

Ketersediaan tenaga kesehatan pada dua

DOB (Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan) beserta dengan daerah induknya (Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kampar). Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Siak dari tahun ke tahun setelah mekar, lebih tinggi daripada kabupaten induknya, yaitu Kabupaten Bengkalis. Hal yang sama juga terjadi pada Kabupaten Pelalawan. Namun jika dibandingkan antara 2 DOB tersebut (Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan), ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten pelalawan tumbuh lebih tinggi daripada di Kabupaten Siak. Hal ini berbanding terbalik dengan ketersediaan fasilitas kesehatan di 2 DOB tersebut, dimana Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Siak justru lebih tinggi dari Kabupaten Pelalawan.

Sementara itu dari sektor infrastruktur keadaan jaringan jalan dengan kondisi baik di Kabupaten Siak dari tahun ke tahun pasca pemekarannya masih belum lebih baik dari daerah induknya. Hal ini dapat terlihat dari kondisi jaringan jalan dalam keadaan baik hanya berkisar rata-rata 35%. Hal ini masih jauh tertinggal dibandingkan daerah induk, yaitu Kabupaten Bengkalis, dimana kualitas jaringan jalan kondisi baiknya sudah mencapai rata-rata sekitar 50%. Namun jika dilihat dari capaian kerja Kabupaten Siak sebagaimana yang terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak tahun 2011-2016, terlihat bahwa capaian kondisi awal dan kondisi akhir Kabupaten Siak dalam hal membangun jalan kabupaten secara efisien dengan kualitas baik dan mengelolanya dengan baik, sudah memenuhi target capaian dimana skor kondisi awal adalah 96 dan kondisi akhir adalah 100. Hal ini menunjukkan bahwa persentase jaringan jalan kondisi baik yang sudah ada saat ini sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh grafik di atas sudah merupakan bentuk maksimal yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Siak sesuai dengan perencanaan pembangunan yang sudah disusun.

Dari uraian data pada masing-masing indikator diatas, selanjutnya dilakukan perhitungan indeks kinerja pelayanan publik dengan cara merata-ratakan jumlah pertumbuhan ketiga Indi-

kator di atas, yaitu indikator jumlah siswa per guru, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan dan kualitas infrastruktur. Didapat data bahwa indeks pelayanan publik di Kabupaten Siak secara umum dari tahun ke tahun pasca pemekaran-nya dari Kabupaten Bengkalis, ternyata belum lebih baik dari Kabupaten Induknya. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Kabupaten Pelalawan. Indeks pelayanan publik di Kabupaten Pelalawanpun belum mampu lebih baik dari Kabupaten Kampar sebagai daerah induknya dari tahun ke tahun pasca pemekarannya. Hanya saja, jika dibandingkan kedua DOB tersebut, Kabupaten Siak memang lebih unggul dari Kabupaten Pelalawan berdasarkan indeks pelayanan publik.

SIMPULAN

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pemekaran dari aspek perekonomian ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi (lebih tinggi dari kabupaten induk), pertumbuhan PDRB per Kapita yang tinggi (lebih tinggi dari kabupaten induk), pertumbuhan kontribusi PDRB per kapita kabupaten terhadap PDRB provinsi yang tinggi dan angka kemiskinan yang rendah pada daerah otonom baru. Beberapa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pemekaran suatu daerah yaitu: Angka kemiskinan suatu daerah menjadi faktor yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan pemekaran suatu daerah. Meskipun PDRB per kapita suatu daerah cukup tinggi tetapi jika angka kemiskinannya juga tinggi, maka daerah tersebut belum termasuk berhasil. Seperti Kabupaten Pelalawan yang memiliki PDRB per kapita yang cukup tinggi, lebih tinggi dari Kabupaten Induknya, dan juga lebih tinggi dari Kabupaten Siak sebagai daerah yang dikategorikan berhasil, namun angka kemiskinan Kabupaten Pelalawan juga tinggi sehingga hal tersebut memengaruhi nilai indeks kinerja ekonomi Kabupaten Pelalawan yang secara umum mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, meski Kabupaten Pelalawan memiliki PDRB yang tinggi, namun hal tersebut tidak membawa Kabupaten Pelalawan menjadi daerah otonom baru yang berhasil, terutama ditinjau dari aspek perekonomian daerahnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Amirullah, 2007. *Pengaruh Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Kasus Regional Indonesia 1985-2003*. Depok: FE UI Press
- Fatmawati, 2011. *Faktor-Faktor Keberhasilan Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
- Farida, A., 2010, *Pertarungan Gagasan dan Kekuasaan dalam Pemekaran Wilayah (Studi Kasus: Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo di Provinsi Jambi)*, Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- Fitriani, Fitria, Hofman Bert dan Kai Kaser., 2005, *Unity in Diversity? The Creation of New Local Government in a Decentralising Indonesia*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 41 No 1 halaman 57–79.
- Ida, Laode., 2005. *Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia*. Jakarta: Media Indonesia
- Makagansa, HR. 2008. *Tantangan Pemekaran Daerah*. Yogyakarta: Fuspend
- Prasojo, Eko dkk., 2012. *Dampak dan Masalah-Masalah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi Baru*. Jakarta: UI Press
- Pratama, M.R. 2010. *Politik Pemekaran Wilayah Studi Kasus Pembentukan Kota Tangerang Selatan*. Jakarta: Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Rachim, Ratri Furry Pustika, 2013. *Evaluasi Pemekaran Wilayah Kota Serang Ditinjau dari Kinerja Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Publik Daerah*. Semarang: Universitas Diponogoro
- Ratnawati, Tri., 2005. *Pemekaran Wilayah dan Alternatif Pemecahan Wilayah: Revisi Mendasar Terhadap PP 129 Tahun 2000*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa
- Tarigan, Antonius., 2010, *Dampak Pemekaran Wilayah*, dalam *Majalah Perencanaan Pembangunan* Edisi 01: 22-26. Jakarta: Bappenas.